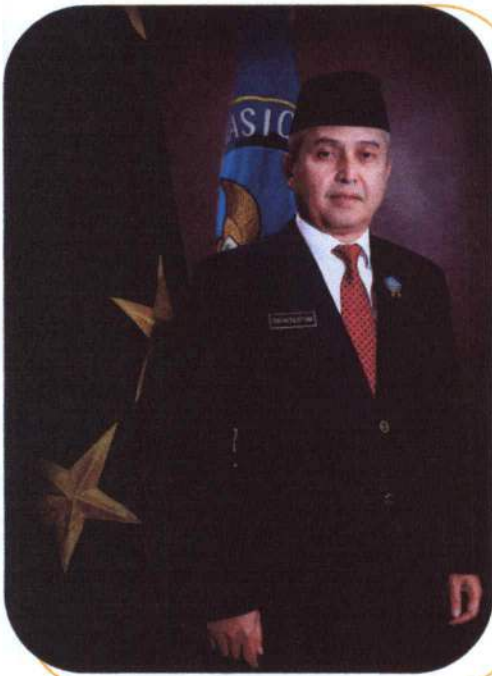


KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional (Settama BNN) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Settama BNN Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Settama BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Settama BNN selama Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Settama BNN untuk mendukung Organisasi BNN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

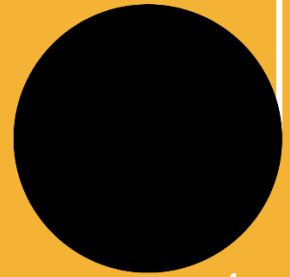
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Februari 2024
Sekretaris Utama BNN

Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.



**BADAN
NARKOTIKA
NASIONAL**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sekretariat Utama BNN

2023



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional (Settama BNN) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Settama BNN Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk

pertanggung jawaban Settama BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Settama BNN selama Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Settama BNN untuk mendukung Organisasi BNN dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Februari 2024
Sekretaris Utama BNN

Tantan Sulistyana, S.H., S.I.K., M.M.

DAFTAR ISI

COVER.....	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	2
B. DASAR HUKUM	2
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	8
C. PERJANJIAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS.....	14
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	26
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	v
LAMPIRAN I RENCANA KERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2023.....	vi
LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA TAHUN 2023	vii
LAMPIRAN III HASIL SURVEI OPINI PUBLIK TAHUN 2023	viii
LAMPIRAN IV HASIL SURVEI KEPUASAN LAYANAN TAHUN 2023.....	ix
LAMPIRAN V HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023.....	x

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Program, Kegiatan, dan Target Kinerja Settama BNN 2020-2024	7
Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator Kinerja, Penetapan Target Kinerja, Serta Kebutuhan Pendanaan Settama BNN Tahun 2023	9
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023	10
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Program Sekretariat Utama BNN Tahun 2023.....	14
Tabel 3. 2 Rincian Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas Implementasi SAKIP di Lingkungan BNN	15
Tabel 3. 3 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Kepegawaian dan Organisasi	18
Tabel 3. 4 Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi Tahun 2020-2023	19
Tabel 3. 5 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	19
Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Bidang Keuangan.....	21
Tabel 3. 7 Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi Tahun 2023	22
Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	22
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Settama BNN Per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	26
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Settama BNN Per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Sekretariat Utama BNN.....	4
Gambar 3. 1 Perbandingan Nilai AKIP BNN dengan Rata-rata K/L Tahun 2016-2023	15

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Settama BNN tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi BNN. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah sistem maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Dengan disusunnya Laporan Instansi Pemerintah (LKj) Settama BNN Tahun 2023, Akuntabilitas Settama BNN dalam menyelenggarakan tugas fungsinya melalui berbagai kegiatan dapat disajikan dalam laporan ini. Penyusunan LKj Settama BNN tahun 2023 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2023 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut.

Kami juga menyadari bahwa penyajian laporan ini masih memiliki kelemahan, dengan adanya kelemahan ini memungkinkan terjadinya perbedaan antara kinerja yang telah dicapai dengan harapan masyarakat dan hasil pembangunan yang diinginkan. Settama BNN pada tahun 2023 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 470.267.731.000 dengan realisasi sebesar Rp. 452.662.126.357,- atau 96.26%. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pada tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN



A. GAMBARAN UMUM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dari berbagai komponen namun merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Hal tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional (Settama BNN) Tahun 2023 yang menyajikan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah diperjanjikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNN dan memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Settama BNN sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I di lingkungan BNN yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN, selain itu Settama BNN juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNN secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN;

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022, Settama BNN merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

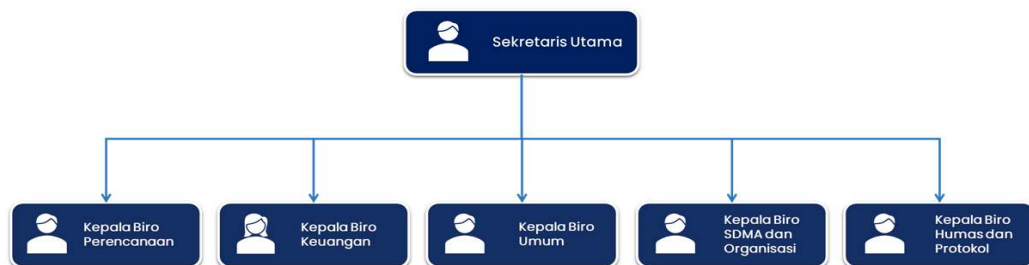
- a) pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b) pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d) pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f) pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Settama BNN dalam melaksanakan tugas fungsi dibantu oleh 5 (lima) unit kerja, yaitu:

- a) Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan;
- b) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan

- administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- c) Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran dan penerimaan anggaran, proses dan pembayaran belanja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - d) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - e) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, urusan protokol dan hubungan antar lembaga.

Struktur Settama BNN, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1 Struktur Sekretariat Utama BNN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Settama BNN didukung oleh Pegawai sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) pegawai. Pegawai Settama tersebut terdiri dari PNS, CPNS, Polri, P3K, dan PPNNP yang tersebar di 5 Biro di lingkungan Settama BNN. Berikut disajikan data pegawai di Lingkungan Settama BNN sebagai berikut:

- a) Biro Perencanaan didukung oleh sejumlah 45 pegawai yang terdiri dari 38 PNS, 1 Polri, dan 6 PPNNP.
- b) Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi didukung oleh sejumlah 78 Pegawai yang terdiri dari 55 PNS, 5 Polri, 4 P3K, dan 14 PPNNP.
- c) Biro Keuangan didukung oleh sejumlah 47 Pegawai yang terdiri dari 36 PNS, 1 CPNS, 2 Polri, dan 8 PPNNP.
- d) Biro Umum didukung oleh sejumlah 62 pegawai yang terdiri dari 53 PNS dan 9 Polri.
- e) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol didukung oleh sejumlah 54 Pegawai yang terdiri dari 16 PNS, 13 Polri, 3 P3K dan 22 PPNNP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

1. Visi Settama:

Memperhatikan Peraturan Kepala (Perka) BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, Settama BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN yaitu **“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”**. Visi BNN 2020-2024 tersebut merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Keseluruhan unit kerja eselon II termasuk Settama BNN perlu mendasari visinya pada visi BNN secara terpusat untuk mencapai tujuan bersama seperti yang sudah diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Misi Settama

Settama BNN berkewajiban mendukung perwujudan visi BNN tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Upaya untuk mendukung keberhasilan Visi BNN 2020-2024, misi Settama BNN memiliki terkait dengan tugas dan fungsinya. Adapun Misi Settama yaitu: **“Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan”**. Misi tersebut selaras dengan arah gerak pengembangan organisasi BNN untuk periode 2018-2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen *Grand Design* BNN 2018-2045, yaitu “menata dan menguatkan manajemen internal untuk menjadi organisasi yang tangguh, profesional, dan terpercaya”.

3. Tujuan

Settama BNN menjabarkan Visi dan misi BNN tersebut ke dalam tujuan yang ingin dicapai yaitu: **“Mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkualitas”**. Tujuan tersebut merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik BNN.

4. Sasaran

Tolok ukur pencapaian tujuan yang mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai, dirumuskan dalam sasaran strategis: **“Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi BNN.** Sasaran strategis tersebut mencerminkan keberfungsian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program dukungan manajemen di lingkungan BNN. Adapun sasaran program yang merepresentasikan *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi Settama BNN, yaitu: **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN”** Keberhasilan pencapaian sasaran program tersebut diukur dengan indikator Nilai AKIP BNN, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi, serta Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN. Sasaran Program dan kegiatan berserta indikator yang menjadi tanggung jawab Settama BNN, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Program, Kegiatan, dan Target Kinerja Settama BNN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	65	70	75	78	80	Settama BNN
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	80	81	82	83	84	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	65	70	75	80	85	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80	82	84	86	90	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3.1	3.1	3.3	3.4	3.5	Biro SDM dan Organisasi
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	74 %	78 %	82 %	86 %	90 %	
Pembinaan Administrasi dan	Meningkatnya tata kelola	Nilai kualitas laporan	100	100	100	100	100	Biro Keuangan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Keuangan	administrasi keuangan yang sesuai prosedur	keuangan satuan kerja						
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	4	4	4	4	
Penyelengga raan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelengga raan Ketatausaha an	3	3.1	3.2	3.3	3.4	Biro Umum
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/ Jasa	3	3.1	3.2	3.3	3.4	
Penyelengga raan Kehumasan dan Keprotokolan Meningkatnya fungsi layanan publikasi	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolan yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	3	3.5	4	4.5	5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	80 %	85 %	87 %	90 %	92 %	

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Settama BNN menetapkan RKT 2023 sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tetap mempedomani Renja BNN Tahun 2023. Alokasi anggaran Settama BNN tercakup pada Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program **"Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN"**. Alokasi anggaran untuk kegiatan layanan yang dilakukan oleh Settama pada Tahun Anggaran 2023, memiliki beberapa fokus sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan fungsi Tim RB Internal, asesor, dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RB pada unit kerja serta memastikan berjalannya tindak-lanjut perbaikan.
2. Melakukan redesain penjenjangan kinerja yang memenuhi prinsip logis hubungan sebab-akibat serta pemecahan masalah secara utuh sesuai kondisi dihadapi.
3. Melakukan perbaikan instrumen pengukuran dan pengukuran data kinerja.
4. Melakukan evaluasi kelembagaan terkait penguatan peran dan fungsi instansi vertikal BNN dalam rangka perluasan wilayah pelayananan P4GN.

5. Menyusun pedoman sistem kerja aparatur BNN yang lincah, fleksibel, dan kolaboratif.
6. Meningkatkan layanan pengelolaan administrasi kepegawaian dan fasilitasi pengelolaan jabatan fungsional.
7. Melakukan peremajaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran.
8. Melakukan Kajian Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Gedung Instansi Vertikal BNN.
9. Melakukan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sumber daya kehumasan.
10. Melakukan Kajian Pendahuluan (*Background Study*) Penyusunan Rencana Strategis BNN 2025-2029 dan Kajian Persiapan BNN Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Adapun sasaran, indikator kinerja, penetapan target kinerja, serta kebutuhan pendanaan Settama BNN Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran, Indikator Kinerja, Penetapan Target Kinerja, Serta Kebutuhan Pendanaan Settama BNN Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Pendanaan (Ribu)
1	2	3	4	5
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	75	1.009.849.627
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	82	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	80	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	17.865.671
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3,4	18.378.994
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	86%	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100%	585.383.140
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3,3	373.945.377
		Indeks Kualitas Pengadaan dan	3,3	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Pendanaan (Ribu)
1	2	3	4	5
Sarana dan Prasarana		Pengelolaan Barang/Jasa		
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Meningkatnya fungsi layanan publikasi kelembagaan dan keprotokolan yang optimal	Indeks Layanan Kehumasan	3,65	14.276.445
		Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	86%	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Settama BNN merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala BNN untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja diharapkan dapat mewujudkan komitmen Settama BNN atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang ada pada Settama BNN. Perjanjian Kinerja Settama BNN disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja settama BNN Tahun 2023 dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	75 Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	83 Indeks
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	80 Indeks

Untuk mencapai seluruh target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Sekretariat Utama mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.416.306.382.000 (Satu Triliun Empat Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) Biro di lingkungan Sekretariat Utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biro Keuangan Settama BNN untuk melaksanakan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 602.214.579.000,-

- 
2. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Settama BNN untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 20.160.587.000,-
 3. Biro Perencanaan Settama BNN untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Program dan Anggaran BNN sebesar Rp. 19.029.054.000,-
 4. Biro Umum Settama BNN untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 760.395.117.000,-
 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Settama BNN untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan sebesar Rp 14.507.045.000,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Settama BNN merupakan analisis realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS

Capaian Kinerja menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. 3 (tiga) target kinerja Settama BNN tahun 2023 telah terlaksana meskipun belum seluruhnya tercapai 100%, namun tetap pada kategori baik, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Program Sekretariat Utama BNN Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai AKIP	75	68,91	91,88	Kategori B atau Interpretasi Baik
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	83	89,34	107,64	
	Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	80	77,32	96,65	Kategori Baik

Analisa capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Settama BNN dinyatakan efektif dan efisien ditandai dengan capaian nilai kelembagaan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai AKIP, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi, dan Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BNN dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, bahwa penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BNN meliputi:

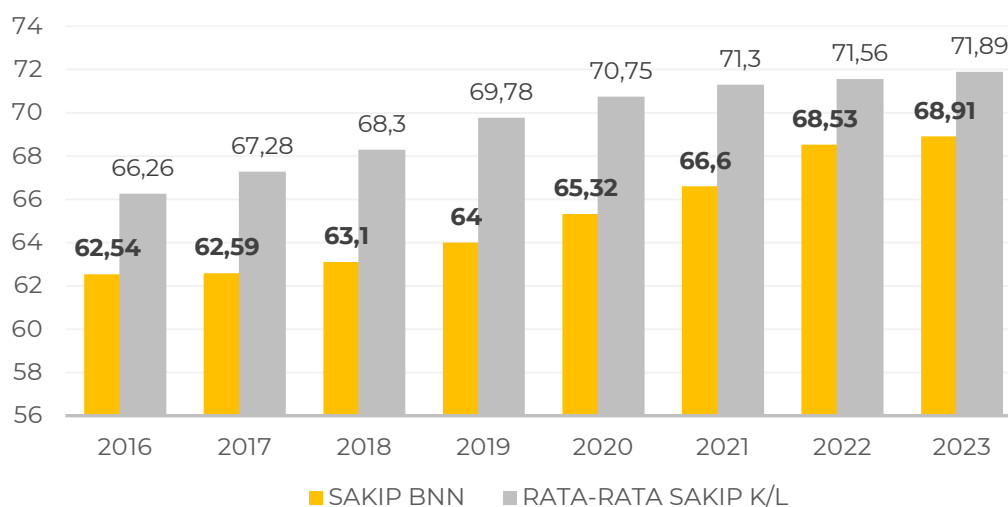
- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Nilai akuntabilitas kinerja merupakan nilai/hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan instansi pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkungan BNN atas implementasi Tahun 2023, BNN memperoleh nilai 68,91 dengan Kategori B atau Interpretasi Baik dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rincian Hasil Evaluasi Kemenpan RB atas Implementasi SAKIP di Lingkungan BNN

Komponen Yang dinilai		Bobot	Nilai
1		2	3
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,05
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,14
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,04
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,91
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel tersebut Nilai AKIP BNN pada tahun 2023 sebesar 68,91 dengan predikat B, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja BNN “Baik”. Meskipun tiap tahunnya capaian nilai AKIP belum mencapai target yang ditetapkan, namun peningkatan nilai implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Berikut nilai AKIP BNN dibandingkan nilai rata-rata K/L dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Perbandingan Nilai AKIP BNN dengan Rata-rata K/L Tahun 2016-2023

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BNN, diantaranya:

- a) Menyusun Indikator Utama sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.
- b) Menyusun Penjenjangan Kinerja untuk memberikan panduan/pengarahan yang jelas terkait pembagian kerja sesuai dengan bidang yang ada. Pembagian tugas yang dilakukan dibuat berdasarkan prinsip penjenjangan kinerja/cascading kinerja sebagai penyelarasan kinerja dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah sebagai salah satu proses perencanaan dalam akuntabilitas kinerja, sehingga dapat dipastikan bahwa kinerja terbagi habis dari level pimpinan sampai dengan level staf.
- c) Melakukan revisi Peraturan Kepala BNN tentang Pengelolaan SAKIP di lingkungan BNN dengan melakukan penyesuaian dengan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP, hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- d) Melakukan reviu Renstra BNN Tahun 2020-2024 yang menghasilkan menjadi rekomendasi untuk penajaman Rencana Strategis BNN 2022-2024 mengenai strategi dan aksi yang perlu dilakukan oleh BNN dalam rangka pencapaian tujuan serta indikator keberhasilan Renstra BNN 2020-2024.
- e) Penyusunan *Background Study* yang menjadi dokumen awal dari proses penyusunan Rencana Strategis BNN 2025-2029 yang berfokus kepada telaah lingkungan kinerja dan isu strategis BNN secara kelembagaan baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kajian juga mencoba untuk menyelaraskan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya yaitu Renstra tahun 2020-2024. Selain itu juga dimaksudkan untuk menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis argumentasi ilmiah dalam penyusunan Rencana Strategis BNN 2025-2029, sekaligus menyiapkan kerangka logis Rencana Strategis BNN 2025-2029.
- f) Melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran BNN untuk meningkatkan pemahaman para pegawai yang menangani urusan perencanaan dan penganggaran di lingkup BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja BNN, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penyusunan kebutuhan anggaran biaya operasional rutin unit kerja, pelaporan realisasi capaian kinerja dan

anggaran pada sistem pelaporan pemerintah, dan pengelolaan PNBPN di lingkungan BNN.

- g) Melakukan transformasi digital berupa Aplikasi E-Kinerja dan telah dilakukan pengembangan untuk mendukung penyediaan informasi kinerja di lingkungan BNN dan untuk perbaikan pelayanan informasi kinerja BNN. Oleh karena itu dengan dibangunnya aplikasi E-Kinerja dapat dipergunakan sebagai media untuk menampung informasi kinerja kelembagaan sehingga dapat membantu dalam penarikan data terkait informasi kinerja secara cepat, tepat, dan akurat. Data informasi yang akan disajikan dalam Aplikasi meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, beserta seluruh indikator-indikator yang dapat memenuhi tercapainya sasaran tersebut. Sistem tersebut diintegrasikan dengan aplikasi Simpeg BNN dan berbasis website. Sebagai Akun Admin dalam operasionalisasi aplikasi adalah pimpinan unit kerja dan didampingi satu orang staf sebagai operatornya.

2. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi

Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi merupakan penilaian atas tingkat kepuasan pelayanan internal BNN terhadap para pegawai selaku penerima pelayanan dalam mengorganisasi dan mewujudkan kinerja organisasi. Dimensi kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi yang terdiri dari beberapa layanan yaitu:

- a) pengelolaan tata laksana/prosedur kerja;
- b) administrasi kepegawaian;
- c) pengembangan sumber daya aparatur;
- d) kompensasi (penggajian); dan
- e) pengelolaan sarana prasarana perkantoran.

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 83 dan terealisasi 89,34. Pengukuran indeks tersebut dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit dari kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Biro Umum, dan Biro Keuangan melalui layanan kepegawaian dan organisasi, layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, dan layanan Bidang Keuangan.

Adapun mekanisme penilaian atas pelayanan Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Layanan Kepegawaian dan Organisasi

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Setda BNN terhadap pelayanan kepegawaian di lingkungan BNN. Untuk mengukur Indeks dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan 15 (lima belas) pertanyaan secara *online* pada aplikasi *formulir* elektronik kepada Satuan Kerja di

lingkungan BNN. Jumlah pegawai yang mengisi formulir sebanyak 100 orang perwakilan dari satker di lingkungan BNN sebagai sampelnya. Penilaian kuesioner dilakukan dengan skala *likert* 1 – 4 dan prosesnya sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu 0,07. Nilai rata-rata dari masing-masing parameter pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Kepegawaian dan Organisasi

No.	Parameter Pelayanan	Nilai
1	2	3
1.	Apakah anda puas dengan layanan Aplikasi Simpeg yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,46
2.	Apakah anda puas dengan layanan Kenaikan Pangkat yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,59
3.	Apakah anda puas dengan layanan Mutasi Pegawai yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,44
4.	Apakah anda puas dengan layanan Promosi Pegawai yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,47
5.	Apakah anda puas dengan layanan Pencantuman Gelar yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,54
6.	Apakah anda puas dengan layanan Seleksi Ujian Dinas dan Seleksi Penyesuaian Ijazah yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,53
7.	Apakah anda puas dengan layanan Seleksi Tugas Belajar Mandiri yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,52
8.	Apakah anda puas dengan layanan Beasiswa dari BNN maupun dari instansi terkait yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,54
9.	Apakah anda puas dengan layanan Seleksi PKP, PKA, dan PKN yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,51
10.	Apakah anda puas dengan layanan Seleksi Dikbang Polri yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,47
11.	Apakah anda puas dengan layanan Pemberian Satya Lencana yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,66

No.	Parameter Pelayanan	Nilai
1	2	3
12.	Apakah anda puas dengan layanan Pemberian Tunjangan Anak Istri yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,70
13.	Apakah anda puas dengan layanan Penilaian Kompetensi (<i>Assessment</i>) yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,56
14.	Apakah anda puas dengan layanan Pemberian Cuti (di luar tanggungan negara, besar, ibadah) yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,67
15.	Apakah anda puas dengan layanan Konsultasi Pegawai yang dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN?	3,65

Dari tabel di atas setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus yang telah ditetapkan, realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 3,56 atau tercapai 104% dari target yang ditetapkan sebesar 3,4 Realisasi Kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 mengalami kenaikan kepuasan satker atas pelayanan yang diberikan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, untuk realisasi tahun 2022 sebesar 3,2 sedangkan tahun 2023 sebesar 3,56 atau mengalami peningkatan 11,25% atau 0.36 poin. Berikut nilai kinerja pelayanan selama 4 tahun terakhir disampaikan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 4 Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi Tahun 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2	3	4
2020	3,1	3,23	104,19
2021	3,2	3,3	103,12
2022	3,3	3,2	96,96
2023	3,4	3,56	104,70

b) Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk memperoleh nilai dengan menggunakan 7 Parameter. Dari data hasil penyebaran kuesioner, setelah dilakukan perhitungan nilai konversi, kategori penilaian kepuasan pelayanan dengan Jumlah Indeks 4,151 dan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 83,02 adalah Kategori: **BAIK**. Berikut nilai masing-masing parameter, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Parameter Pelayanan	Nilai
1	2	3
1.	Apakah Pengadaan sarana dan prasarana di satuan kerja Saudara sudah sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN)?	4,176

2.	Apakah Rencana pengadaan sarana dan prasarana (Gedung Kantor dan Kendaraan Jabatan) di satuan kerja Saudara sudah melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)?	4,166
3.	Apakah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di satuan kerja Saudara telah dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?	4,160
4.	Apakah Para Pelaku Pengadaan di di satuan kerja Saudara telah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?	4,135
5.	Apakah di satuan kerja Saudara telah menerima Layanan Pengelolaan Mesin Absensi Elektronik dengan baik?	4,171
6.	Apakah Pemegang Senjata Api di satuan kerja Saudara sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional?	4,109
7.	Apakah Pengelolaan barang persediaan di satuan kerja Saudara sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Persediaan?	4,140
Nilai Rata-rata		4,151
Nilai Indeks Kepuasan		83,02

Dari data hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Setelah dilakukan perhitungan nilai konversi, kategori penilaian kepuasan pelayanan dengan Jumlah Indeks 4,151 dan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 83,02 adalah Kategori: **BAIK**
- 2) Dari jawaban responden dalam mengisi kuesioner diperoleh:
 - **Persepsi tertinggi** terhadap Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BNN sudah sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN).
 - **Persepsi terendah** terhadap Pemegang Senjata Api di lingkungan BNN sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

c) Layanan Bidang Keuangan

Untuk memperoleh Nilai dengan 4 parameter dengan 9 pertanyaan/pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner. Sebagai responden dalam survei tersebut adalah perwakilan dari 223 satuan kerja di lingkungan BNN. Setelah dilakukan penghitungan maka nilai masing-masing parameter dapat disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 3. 6 Nilai Rata-Rata Parameter Layanan Bidang Keuangan

No.	Pertanyaan	Nilai
1	2	3
1.	Apakah anda puas dengan layanan pembayaran tunjangan kinerja setiap bulannya yang dibayarkan oleh Biro Keuangan?	3.85
2.	Apakah anda puas dengan layanan pembayaran uang makan setiap bulannya yang diajukan satker ?	3.85
3.	Apakah anda puas dengan layanan permintaan data dan informasi tentang gaji dan tunjangan yang melekat?	3.82
4.	Apakah anda puas dengan kecepatan Tim Biro Keuangan BNN dalam merespon permasalahan terkait belanja pegawai (Gaji, tunjangan kinerja dan Uang makan)?	3.83
5.	Apakah anda puas dengan kecepatan Tim Biro Keuangan BNN dalam merespon permasalahan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah langsung bentuk uang yang diajukan satker?	3.88
6.	Apakah anda puas dengan ketepatan Tim Biro Keuangan BNN dalam memberikan solusi atas permasalahan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah langsung bentuk uang yang diajukan satker?	3.87
7.	Apakah anda puas dengan penyampaian informasi secara cepat dan akurat terkait isu-isu terkini mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan serta hibah langsung bentuk uang melalui media komunikasi (WA Group) yang disediakan oleh Tim Biro Keuangan BNN?	3.84
8.	Apakah anda puas dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Keuangan BNN pada pelaporan keuangan dan hibah langsung bentuk uang?	3.82
9.	Apakah anda puas dengan pendampingan yang selalu dilakukan oleh Tim Biro Keuangan BNN dalam penyusunan Laporan Keuangan setiap periode pelaporan?. Analisa Perhitungan: Nilai indeks kepuasan merupakan jumlah nilai rata-rata masing-masing variabel dibagi dengan banyaknya variabel	3.88

Berdasarkan hasil perhitungan nilai konversi, maka nilai yang diperoleh Settama BNN T.A. 2023 dalam memberikan pelayanan keuangan sebesar 3,84 dengan kategori “Sangat Puas”. Dalam penilaian tersebut persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan pengelolaan penggajian dan pendampingan penyusunan laporan keuangan serta hibah langsung bentuk uang.

Dari ketiga layanan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survei atas layanan Settama BNN yang berasal dari komposisi melalui layanan kepegawaian dan organisasi, layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, dan layanan Bidang Keuangan sebagaimana telah diuraikan di atas, realisasi Settama tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 89,34 dengan Kategori **BAIK** dari target yang ditetapkan sebesar 82. Berikut detail Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 7 Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi Tahun 2023

No.	Instrumen Unit Kerja	Jumlah Responden	Jumlah Parameter	Indeks Kepuasan	Konversi	Pembobotan (Expert Justice)	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Biro SDMAO	100	15	3,56	89,00	1/3	29,67
2.	Biro Umum	193	7	4.151	83,02	1/3	27,67
3.	Biro Keuangan	223 satker	9	3,84	96,00	1/3	32.00
Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi							89,34

Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi yang menjadi tanggung jawab Settama BNN dari tahun ketahun mengalami kenaikan, bahkan telah melampaui target pada akhir periode Renstra 2020-2024 yaitu 84, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4
2020	-	-	-
2021	81	80,73	99,67
2022	82	87,38	106,56
2023	83	89,34	107,64
2024	84	-	N/A

Berdasarkan tabel tersebut, dalam penetapan target masih mengacu pada target yang terdapat dalam Renstra BNN 2020-2024, namun hal tersebut akan dilakukan perbaikan pada penetapan target tahun 2024 dan tahun tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil realisasi pada tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari capaian kinerja Settama tersebut tidak terlepas olah upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing biro penanggung jawab dalam meningkatkan kualitas layanannya. Berikut upaya yang dilakukan pada masing-masing layanan sebagai berikut:

- a) Layanan kepegawaian dan organisasi
 - Melakukan perubahan metode pelayanan kepegawaian dari konvensional menjadi *online*, salah satu contohnya adalah pengajuan dokumen administrasi untuk tugas belajar dilakukan secara *online*.
 - Pendelegasian sebagian wewenang pelayanan ke BNN Provinsi, sebagai contohnya adalah gaji berkala, penerapan hukuman disiplin untuk tingkat ringan dan sedang, dan perizinan pernikahan dan perceraian, dan lain-lain.
- b) Layanan Pengelolaan sarana dan Prasarana perkantoran

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mempedomani pelaksanaan pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- Penambahan fasilitas perkantoran untuk mendukung mobilitas pegawai seperti pengadaan *lift* dan penyediaan lahan parkir.
- Kemudahan dalam proses administrasi melalui aplikasi Sistem Informasi Naskah Dinas dan Kearsipan (SI DINAR) sampai tingkat wilayah.

c) Layanan Keuangan

- Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja secara tepat.
- Meningkatkan kemampuan para pengelola layanan bidang keuangan khususnya dalam hal pelaporan dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) melalui asistensi dan bimbingan teknis.
- Membentuk Tim/PIC penelaahan seluruh laporan Keuangan pada setiap jenjang entitas pelaporan dengan memanfaatkan Aplikasi MonSAKTI pada menu “*To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian” sebelum dilakukan konsolidasi laporan Keuangan Tingkat Lembaga.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan di beberapa layanan, namun masih ditemukan beberapa hambatan di beberapa layanan, sebagai contohnya dalam hal layanan kepegawaian dan organisasi masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan, sistem informasi manajemen pelayanan publik belum terintegrasi dan kurang optimal. Sedangkan dalam layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki BNN dan dalam hal layanan keuangan kurangnya SDM pengelola perbendaharaan sehingga banyak terdapat rangkap jabatan dan seringnya terjadi pergantian aplikator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tahun anggaran.

Terhadap kendala-kendala tersebut, Settama BNN akan senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan, seperti.

- Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, kursus keahlian, seminar dan semacamnya.
- Membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain untuk mempermudah pengkoordinasian.
- Pengembangan sistem informasi kepegawaian BNN agar dapat digunakan dalam perangkat *mobile*.

- Guna mendukung peningkatan pelayanan Mengupayakan pembangunan Gedung perkantoran BNNP dan BNN Kab/Kota melalui alternatif pembiayaan misalnya Pinjaman Luar Negeri.
- Membentuk Tim/PIC penelaahan seluruh laporan Keuangan pada setiap jenjang entitas pelaporan dengan memanfaatkan Aplikasi MonSAKTI pada menu “*To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian” sebelum dilakukan konsolidasi laporan Keuangan Tingkat Lembaga.
- Memberikan asistensi pengelolaan keuangan ke Satker di Lingkungan BNN
- Mengusulkan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi untuk membuka terkait peluang SDM untuk mengikuti Uji Kompetensi bidang keuangan.

3. **Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN**

Opini kepercayaan publik merupakan pandangan masyarakat terhadap BNN dalam melaksanakan tugas fungsinya di bidang P4GN. Pengukuran dilakukan melalui jajak pendapat atau opini dari masyarakat umum dan responden terpilih. Untuk mengetahui opini kepercayaan publik tersebut dilaksanakan melalui survei pengukuran dan hasilnya menjadi indikator citra BNN di mata publik atas program dan kinerja yang dilakukan BNN sepanjang tahun 2023. Pengukuran opini kepercayaan publik dilakukan dengan metode kuantitatif (penyebaran kuesioner) menggunakan skala likert untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji. Teknik sampling yang digunakan dalam survei ini yaitu simple random sampling yang disebar ke seluruh Indonesia secara *online*.

Jumlah sampel dalam survei ini melibatkan 1.000 Warga Negara Indonesia (WNI) berusia mulai dari di bawah 20 tahun hingga di atas 40 tahun dengan latar belakang pendidikan adalah mulai SMP sampai dengan S3, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Karyawan Swasta, Wiraswasta, Mahasiswa, dan Pelajar. Selain melakukan pengumpulan data dari kuesioner survei opini kepercayaan publik, pengolahan data juga dilakukan menggunakan sistem *Intelligence Media Analytics (IMA)* dan *Intelligence Socio Analytics (ISA)*. IMA dan ISA adalah sistem media monitoring yang berbasis *artificial intelligence (AI)*. Jenis data yang diambil di IMA adalah indeks media online dan indeks media cetak. Sedangkan jenis data yang diambil di ISA adalah indeks media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram.

Berdasarkan pengumpulan kuesioner dan hasil olah data yang telah dilakukan pada tahun 2023 diketahui bahwa nilai opini kepercayaan publik terhadap BNN memiliki nilai Opini Kepercayaan Publik 3,09 (kinerja BNN Baik) dengan nilai konversi sebesar 77,32. Sedangkan capaian pada tahun 2022 dari Target 75, realisasi 82,01 atau tercapai

109,33%. Meskipun capaian tahun 2023 secara nilai menurun namun masih dalam rentang yang sama dalam kategori baik.

Capaian tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan instrument penghitungan indeks, baik jumlah maupun jenis parameter yang digunakan dalam pengukuran pada tahun 2023. Pada tahun 2022 pengukuran opini kepercayaan publik hanya berfokus pada program dan kebijakan, sedangkan pada tahun 2023 pengukuran juga dilakukan pada publikasi dan informasi serta pelayanan. Perubahan pengukuran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Capaian survei opini kepercayaan publik sebagaimana disebutkan di atas termasuk dalam kategori kinerja baik yang berarti BNN telah berhasil menciptakan citra dan reputasi BNN yang positif. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja masing-masing satuan kerja di lingkungan BNN. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan tersebut, antara lain:

- Adanya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BNN, sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi baik informasi tentang BNN maupun informasi lain terkait narkoba.
- Responsif dan mampu mengelola isu publik yang menjadi kontroversi maupun fenomena sosial di masyarakat secara tepat
- informasi yang disajikan akurat dan aktual dan dikemas secara menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Hasil survei opini kepercayaan publik pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya perubahan pada teknis survei yang dilakukan. guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan petunjuk teknis survei yang jelas dan lengkap sebagai pedoman sehingga terdapat standarisasi pengukuran opini kepercayaan publik. Adanya petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat dilihat dengan jelas pertumbuhan maupun perubahan hasil survei dari tahun ke tahun serta dapat diperbandingkan. Selain strategi tersebut diperlukan juga langkah-langkah antara lain:

- Perlu peningkatan intensifikasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran
- Pembentukan satker di wilayah terutama kabupaten/kota dalam rangka mendekatkan pelayanan langsung kepada masyarakat
- mitigasi yang terukur serta terencana dengan baik misalnya informasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan seimbang
- Pelibatan partisipatif masyarakat dan stakeholder dalam sebuah program, program dengan kepemimpinan kolaboratif pada semua tingkatan harus dioptimalkan

Meskipun Capaian pada tahun 2023 kategori baik, namun masih harus dilakukan upaya-upaya agar kinerja dan citra BNN lebih baik lagi dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan intensifikasi publikasi dan diseminasi informasi baik dalam hal kebijakan maupun program BNN yang dilaksanakan secara masif kepada masyarakat, meningkatkan akses pelayanan terutama pelayanan yang bersifat langsung, mengoptimalkan mitigasi terhadap informasi yang cenderung menyesatkan masyarakat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja Anggaran Settama BNN Tahun 2023 dapat dicapai dengan Baik, realisasi per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 452.662.126.357,- atau 96.26%. Adapun sisa pagu anggaran sebesar Rp 17.605.604.643,-. Pada Tahun 2022 Settama BNN mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 485,346,468,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 477,186,621,686,- atau (98.32%), sedangkan sisa Pagu Anggaran Settama pada tahun 2022 sebesar Rp. 8,159,846,314. Realisasi anggaran Settama BNN Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Settama BNN Per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2023

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	10.166.860.000	9.943.485.894	97.80	103.374.106
2.	Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	10.850.743.000	10.788.617.674	99.43	62.125.326
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	345.204.035.000	329.793.880.206	95.48	15.616.471.774
4.	Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	94.829.203.000	92.935.050.986	98.00	1.89.152.014
5.	Penyelenggaraan Humas dan Keprotokolan	9.216.890.000	9.186.654.651	99.67	30.235.349
Total :		470.267.731.000	452.662.126.357	96.26	17.605.604.643

Sedangkan data realisasi anggaran Settama BNN tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Settama BNN Per Jenis Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa
1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	8.692.904.000	8.383.463.826	96,44	309.440.174
2.	Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	11.440.848.000	11.048.061.226	96,57	392.786.774
3.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	341.588.033.000	336.450.794.006	98,50	5.137.238.994
4.	Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	115.716.778.000	113.405.830.297	98,00	2.310.947.703
5.	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	7.907.905.000	7.898.472.331	99,88	9.432.669
Total :		485.346.468.000	477.186.621.686	98,32	8.159.846.314

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2023 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 di atas, realisasi Settama BNN Tahun 2023 sedikit lebih rendah, hal tersebut disebabkan karena:

1. Pembayaran penyesuaian tunjangan kinerja Pegawai BNN dari 70% menjadi 80% yang yang direncanakan akan dibayarkan dua bulan pada tahun 2023 (November dan Desember), namun hal tersebut tidak dapat terlaksana karena Peraturan Presiden terkait Kenaikan Tunjangan Kinerja BNN belum terbit.
2. Kebijakan penerapan perubahan pembayaran biaya perjalanan dinas luar kota (Jabodetabek) yang semula sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan menjadi *at cost* (sesuai bukti), sehingga anggaran banyak tidak terserap.
3. Kebijakan Pembukaan Blokir (*Automatic Adjustment*) baru dikeluarkan pada Akhir Tahun Anggaran 2023, yaitu pada bulan Oktober 2023 sehingga kesulitan dalam penyerapannya.

GAMBAR